

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai perlindungan hukum investor dalam transaksi investasi aset kripto. Kehadiran virtual currency di Indonesia sebagai produk elektronik sudah menjadi perhatian negara sejak awal, namun hingga saat ini pemerintah belum memutuskan langkah, bagaimana merumuskan aturan tertulis tentang pergerakan dan penertibannya, bagaimana merumuskan kebijakan. dan investor atau pengguna mengamankan transaksi yang terkait dengan investasi virtual berisiko dan rentan terhadap kejahatan dunia maya (*cybercrime*). Metode penelitian ini menggunakan yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Investasi menandakan adanya *Asymmetric Information* antara Pemerintah, Bappebti, Pedagang Fisik Aset Kripto, dan Masyarakat. Sosialisasi akan peraturan-peraturan yang dikeluarkan Bappebti tidak dilakukan secara optimal atau tidak transparan sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui entitas yang terdaftar di Bappebti. Bappebti sebagai regulator hendaknya memberikan edukasi kepada masyarakat tentang aset kripto dan pentingnya memilih investasi melalui pedagang aset kripto yang terdaftar dan disetujui oleh Bappebti serta mengeluarkan kebijakan mengenai tenggat waktu pembentukan bursa berjangka yang memfasilitasi implementasi pasar aset kripto fisik untuk memperkecil peluang terjadinya penipuan antara pelanggan aset kripto dan pedagang aset kripto fisik.

**Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Investasi, Mata Uang Kripto.**

## **ABSTRACT**

*This study aims to analyze the legal protection of investors in Crypto Asset investment transactions. The presence of virtual currency in Indonesia as an electronic product has been a concern for the country since the beginning, but until now the government has not decided on steps, how to formulate written rules on movement and regulation, how to formulate policies. and investors or users securing transactions related to virtual investments are risky and vulnerable to cybercrime. This research method uses normative juridical with a statutory approach (Statute Approach) and a conceptual approach (Conceptual Approach). The results showed that the Implementation of Investment indicates the existence of Asymmetric Information between the Government, Bappebti, Physical Traders of Crypto Assets, and the Public. Socialization of the regulations issued by Bappebti is not carried out optimally or is not transparent so that many people do not know the entities registered with Bappebti. Bappebti as a regulator should educate the public about Crypto Assets and the importance of choosing investments through Crypto Asset traders registered and approved by Bappebti and issue policies regarding deadlines for the establishment of futures exchanges that facilitate the implementation of the physical Crypto Asset market to minimize the chances of fraud between Crypto Asset customers and Crypto Asset traders physical.*

**Keywords: Legal Protection, Investment, Cryptocurrency.**